



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI**

Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45 Jambi 36122
TELEPON: (0741) 668795, 668802, 669528 FAKSIMILE: (0741) 668801
e-mail : kanwil.jambi@kemenkeu.go.id

Nomor : S-1017/WPB.06/BD.03/2018

14 Agustus 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Kajian Fiskal Regional Triwulan II
(Quarterly Fiskal Report) Tahun 2018

Yth. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
JAKARTA 10710

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, dengan ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional Triwulan II (Quarterly Fiskal Report) Tahun 2018 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi.

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Pih. Kepala Kantor,

Aprijon

NIP. 19700212 199603 1 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

QUARTERLY FISCAL REPORT PROVINSI JAMBI

TRIWULAN II 2018



**KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
AGUSTUS 2018**

DAFTAR ISI

I.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	- 1 -
A.	Produk Domestik Regional Bruto	- 1 -
B.	Inflasi	- 2 -
C.	Indikator Kesejahteraan	- 3 -
II.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	- 4 -
A.	Pendapatan Negara	- 5 -
B.	Belanja Negara.....	- 8 -
C.	Prognosis Realisasi APBN	- 10 -
III.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	- 11 -
A.	Pendapatan Daerah	- 13 -
B.	Belanja Daerah.....	- 15 -
C.	Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018	- 16 -
IV.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	- 17 -
V.	BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	- 24 -
A.	Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik di Provinsi Jambi Tahun 2018	- 24 -



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan II
2018

Penyusun:

Penanggung Jawab: Tiarta Sebayang | Ketua Tim: Ahmad Yani |
Editor: Adolf Purba | Yuli Nezal | Desain Foto: Gita Ashabira |
Penyusun: | Bidang PPA II | BPS Prov. Jambi | Bank Indonesia
Perwakilan Jambi

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Jambi

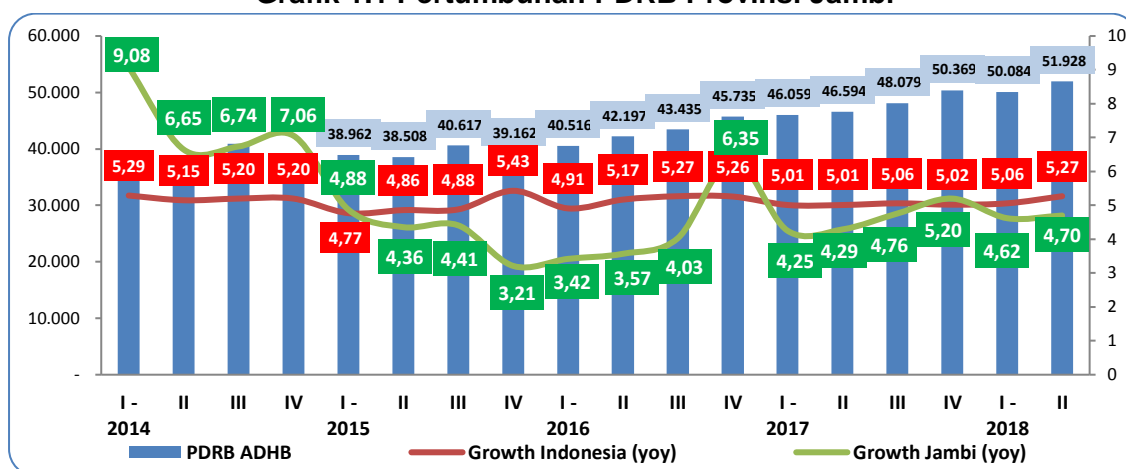
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD maupun alokasi dana APBN di daerah (DIPA kewenangan kantor pusat K/L, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama) merupakan salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping konsumsi dan investasi.

Perekonomian Provinsi Jambi pada triwulan II 2018 tumbuh sebesar 4,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang tumbuh 4,29% (yoy). Pertumbuhan ini juga masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,27% (yoy). Output ekonomi Provinsi Jambi triwulan II ini menghasilkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp51,93 triliun atau 1,41% dari total output Nasional (Rp3.683,9 triliun).

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi



Sumber: BPS (dalam Miliar Rp)

Menurut lapangan usaha, triwulan ini pertumbuhan ekonomi Jambi didorong oleh semua sektor lapangan usaha. Tiga sektor tertinggi pertumbuhannya (yoy) yaitu informasi dan komunikasi (8,28%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (6,74%), serta penyediaan akomodasi dan makan minum (6,65%). Pada triwulan ini, sektor yang menjadi penyumbang andil terbesar pertumbuhan Jambi berasal dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,36%. Sedangkan menurut pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh pengeluaran konsumsi LNRT (14,4%), diikuti pembentukan modal tetap bruto-PMTB (6,74%), sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah mampu tumbuh 5,11%. Sumber pertumbuhan berdasarkan sektor pengeluaran berasal dari ekspor barang dan jasa (3,74%).

Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, terdapat beberapa fenomena yang mempengaruhi output ekonomi Jambi, yaitu: (1) produksi padi menurun panen raya padi jatuh pada triwulan I-2018, (2) produksi CPO meningkat namun ekspornya turun akibat turunnya permintaan global terhadap CPO, (3) adanya momen libur tahun ajaran baru, libur keagamaan (Kenaikan Isa Almasih, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad, Hari Raya Waisak, Bulan Ramadhan, dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H), (4) realisasi APBN triwulan II-2018 lebih tinggi dibanding triwulan II-2017 (adanya realisasi gaji/THR untuk aparatur sipil negara).

Output ekonomi Jambi triwulan II 2018 masih tumbuh 4,70% (yoy). Proyeksi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi untuk ekonomi Jambi hingga akhir tahun diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,55%-4,95%.

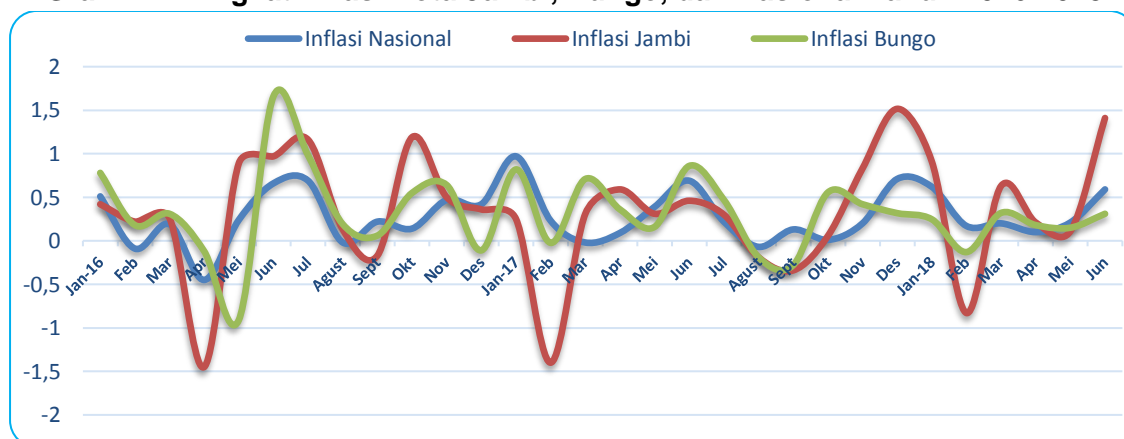
Dilihat dari strukturnya, (sisi lapangan usaha) ekonomi Provinsi Jambi belum mengalami perubahan, masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 27,35% dan diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 20,14%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa menyumbang 68,63%, impor barang dan jasa (sebagai pengurang) sebesar 42,17%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 44,45%. Berdasarkan strukturnya, ekonomi Jambi masih basisnya didominasi pada sektor primer dengan kemampuan penciptaan nilai tambah yang rendah.

Berikutnya berdasarkan proyeksi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, ekonomi Jambi hingga akhir tahun diperkirakan tumbuh di kisaran 4,55%-4,95%. Selain sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian masih akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-IV mengingat harga komoditas migas dan batubara proyeksinya masih stabil (meski trennya menurun). Kebijakan pemerintah terkait penerapan B-20 untuk bahan bakar biodiesel diharapkan mampu meningkatkan harga CPO dalam negeri dan menopang konsumsi masyarakat.

B. Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Data BPS triwulan II 2018, berdasarkan perhitungan bulanan (*mtm*) bulan April, Mei, dan Juni untuk Kota Jambi mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,21%, 0,11%, dan 1,41%. Sedangkan inflasi Bungo masing-masing sebesar 0,18%, 0,15%, dan 0,31%. Kota Jambi berdasarkan perhitungan triwulanan (*qtq*) mengalami inflasi sebesar 1,62%.

Grafik 1.2 Tingkat Inflasi Kota Jambi, Bungo, dan Nasional Tahun 2016-2018



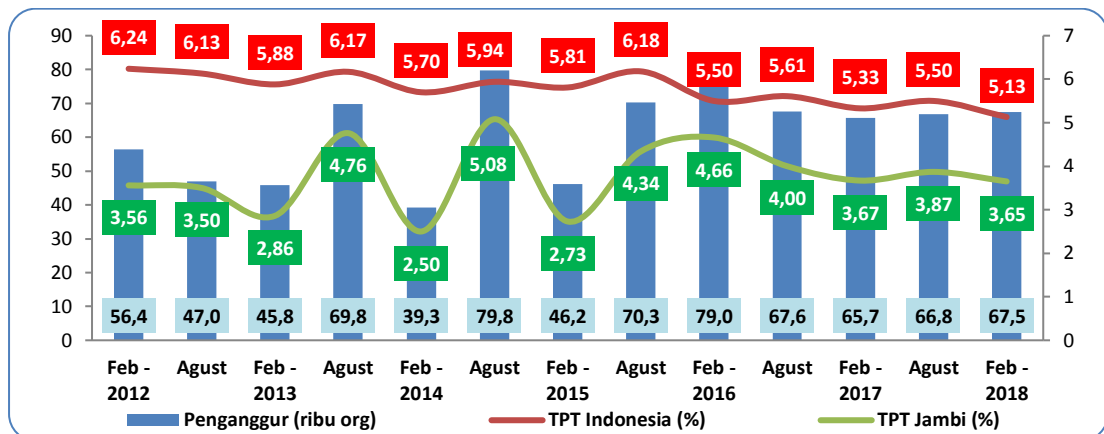
Sumber: BPS

Berdasarkan asesmen Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, sumber inflasi yang berasal dari komponen *volatile foods* berasal dari komoditas cabe merah, nila, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah. Sedangkan komoditas penyumbang inflasi dari kelompok *administered price* diantaranya: angkutan udara, rokok kretek filter, dan bensin. Berikutnya, harga beberapa komoditas (daging sapi, beras, daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah) juga cenderung kembali normal setelah mengalami kenaikan cukup tinggi selama Ramadhan. Proyeksi Bank Indonesia, pada triwulan selanjutnya harga pangan akan kembali normal pasca momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Menurut data BPS (yoy), dari 23 kota se-Sumatera yang dihitung tingkat inflasinya, Kota Jambi (4,39%) dan Bungo (2,37%) menempati urutan tertinggi ke-3 dan ke-21. Inflasi tertinggi di Kota Sibolga (4,66%) dan terendah di Kota Metro (1,35%).

C. Indikator Kesejahteraan

Grafik 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jambi dan Nasional Tahun 2012-2018

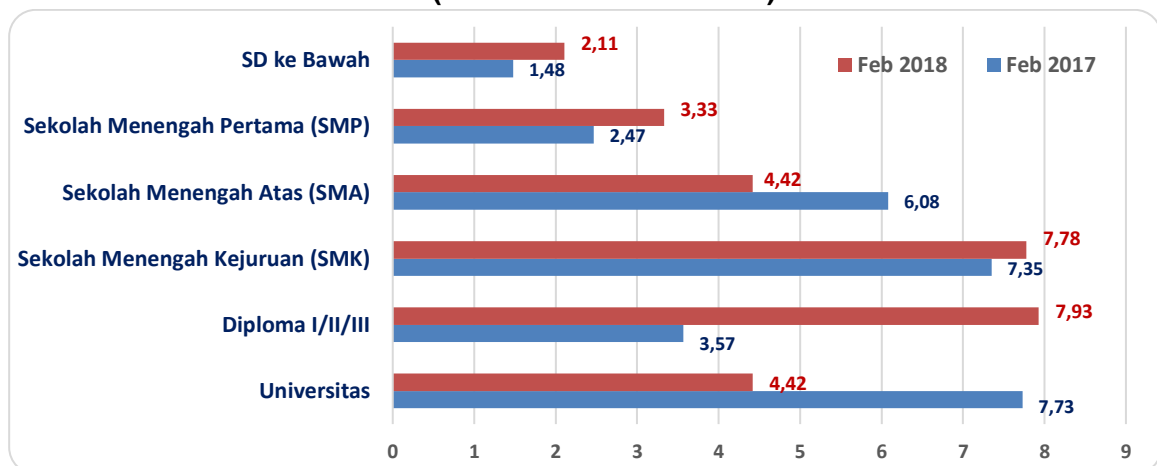


Sumber: BPS

“Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi pada Februari 2018 tercatat sebanyak 67,5 ribu orang. Jumlah ini lebih tinggi sebesar 1,8 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 65,7 ribu orang”

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2018 sebesar 3,65%, turun dibandingkan pada Februari 2017 (3,67%), dan masih lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 5,13%. Meskipun jumlah TPT Jambi turun namun terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu: (1) penyumbang tertinggi tingkat pengangguran terdapat pada golongan dengan tingkat pendidikan diploma I/II/III dan sekolah menengah kejuruan (SMK), dapat diindikasikan bahwa keterampilan yang dihasilkan oleh jenjang pendidikan vokasi dan SMK belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. (2) tenaga kerja yang terserap lapangan kerja masih didominasi (42,7%) oleh golongan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah sebanyak 759,9 ribu orang.

Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan (Februari 2018 dan 2017)



Sumber: BPS

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Informasi berikut merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluruh Kementerian/Lembaga/Satker lingkup Provinsi Jambi, termasuk data Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018;

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2018 dan 2017

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018		Change
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
A. PENDAPATAN NEGARA	4.910,6	1.960,1	5.973,1	2.065,2	5,4%
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	4.910,6	1.960,1	5.973,1	2.065,2	5,4%
1. Penerimaan Pajak	4.498,7	1.718,2	5.445,2	1.732,3	0,8%
2. PNBPN	411,9	242,0	527,9	332,9	37,6%
II. HIBAH	-	-	-	-	
B. BELANJA NEGARA	19.963,6	9.697,8	20.044,9	9.213,1	-5,0%
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	5.934,4	2.171,1	6.398,9	2.182,2	0,5%
1. Belanja Pegawai	2.220,3	978,1	2.278,1	1.045,8	6,9%
2. Belanja Barang	2.217,0	697,4	2.534,0	817,0	17,2%
3. Belanja Modal	1.471,3	491,3	1.567,8	315,0	-35,9%
4. Belanja Bantuan Sosial	25,7	4,3	18,9	4,3	-0,7%
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-	
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	14.029,3	7.526,7	13.646,0	7.030,9	-6,6%
1. Transfer ke Daerah	12.938,3	6.873,3	12.598,7	6.408,8	-6,8%
a. Dana Perimbangan	12.873,4	6.808,3	12.378,2	6.298,6	-7,5%
1) Dana Alokasi Umum	7.957,6	4.629,7	7.969,3	4.648,7	0,4%
2) Dana Bagi Hasil	2.076,0	1.144,5	1.434,2	545,0	-52,4%
3) Dana Alokasi Khusus	2.839,8	1.034,1	2.974,7	1.104,9	6,8%
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-	
d. Dana Transfer Lainnya	65,0	65,0	220,5	110,3	69,7%
2. Dana Desa	1.090,9	653,4	1.047,3	622,1	-4,8%
C. SURPLUS/DEFISIT	(15.053,0)	(7.737,6)	(14.071,8)	(7.147,9)	7,6%

Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, KPP se-Prov. Jambi (*Unaudited*)

Realisasi APBN lingkup Provinsi Jambi s.d. triwulan II-2018 menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp2,06 triliun. Tumbuh sebesar 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp1,96 triliun). Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh perbaikan kinerja penerimaan perpajakan (Rp1,73 triliun) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp332,9 miliar. Secara kumulatif penerimaan perpajakan masih mampu tumbuh 0,8% (tanpa program *tax amnesty*) dibanding tahun 2017 (Rp1,72 triliun).

Realisasi belanja negara sebesar Rp9,21 triliun, kontraksi 5,0% dibanding triwulan II-2017 (Rp9,69 triliun). Jumlah tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2,18 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp7,03 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga triwulan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp2,17 triliun). Salah satu penyebabnya yaitu adanya pencairan gaji/tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN).

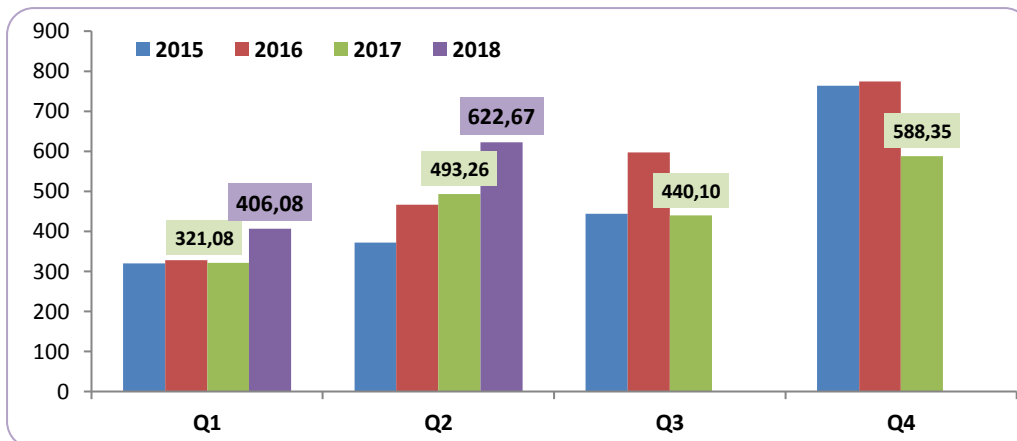
A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak internasional. Berikut adalah data pendapatan perpajakan yang dihasilkan di Provinsi Jambi;

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan PPh 2015-2018 di Provinsi Jambi

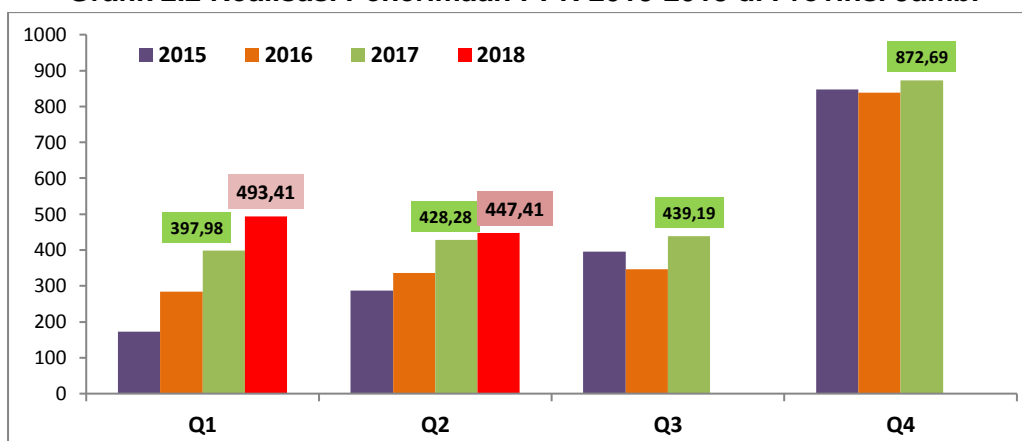


Sumber: SPAN (diolah); (dalam Miliar Rp)

Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) triwulan II sebesar Rp622,67 miliar. Jumlah tersebut naik 26,2% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2017 (Rp493,26 miliar). Peningkatan disumbang oleh realisasi PPh Ps 25/29 Badan sebesar Rp253,6 miliar (triwulan II-2017 Rp177,4 miliar) atau naik Rp76,2 miliar. Selanjutnya, PPh Ps 21 dan PPh Final masih mampu tumbuh masing-masing sebesar Rp185,7 miliar (32,1%) dan Rp98,7 miliar (0,6%) dibanding triwulan tahun sebelumnya (Rp140,6 miliar dan Rp98,1 miliar).

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan PPN 2015-2018 di Provinsi Jambi

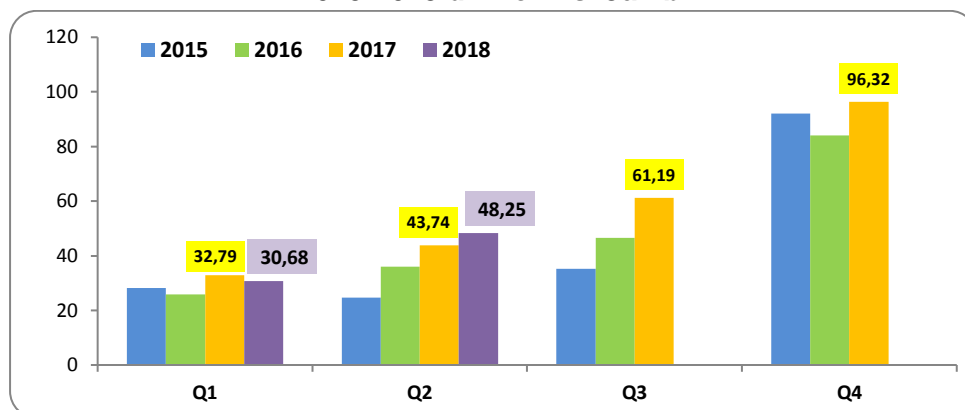


Sumber: KPP se-Prov. Jambi (diolah) (dalam Miliar Rp)

Realisasi PPN triwulan II 2018 sebesar Rp447,41 miliar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 4,46% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017 (Rp428,28 miliar). PPN Dalam Negeri masih menjadi dominan membentuk penerimaan PPN sebesar Rp446,8 miliar atau 99,8% dari total Penerimaan PPN. Sedangkan PPN Impor, PPN Lainnya dan PPnBM Dalam Negeri secara total hanya sebesar Rp0,6 miliar.

c) Pendapatan Pajak Lainnya & Pajak Perdagangan Internasional

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pajak Lainnya & Pajak Perdagangan Internasional 2015-2018 di Provinsi Jambi

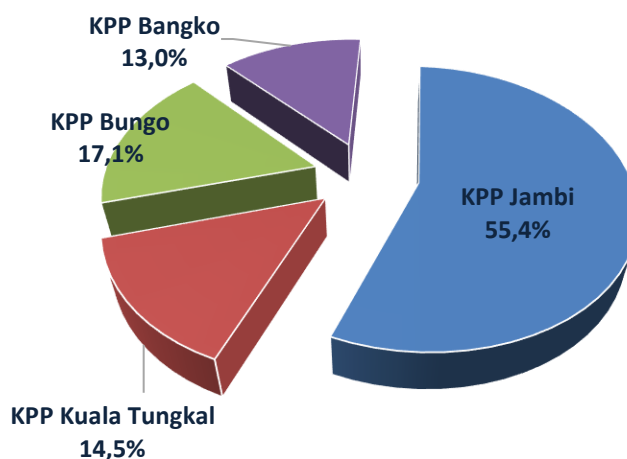


Sumber: SPAN (diolah) (dalam Miliar Rp)

Realisasi Pendapatan Pajak Lainnya dan Pajak Perdagangan Internasional triwulan II 2018 mencapai Rp48,25 miliar. Tumbuh lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2017 (Rp43,74 miliar). Rinciannya, Pendapatan Pajak Lainnya Rp25,63 miliar. Terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp9,9 miliar dan Pajak Lainnya Rp12,18 miliar, sedangkan realisasi Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp26,15 miliar terdiri dari Bea Masuk (Rp3,05 miliar) dan Bea Keluar (Rp22,3 miliar).

Penerimaan Pajak Menurut KPP Lingkup Provinsi Jambi

Grafik 2.4 Komposisi Penerimaan Pajak Menurut KPP Tahun 2018 (s.d. Triwulan II)



Sumber: KPP se-Provinsi Jambi

Berdasarkan data dari KPP di Provinsi Jambi (dari target Rp4,49 triliun), hingga 2018-Q2 telah tercapai sebesar Rp1,74 triliun atau 31,96% dari target. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (37,9%). Namun secara nominal sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya (Rp1,70 triliun), komposisinya yaitu: KPP Jambi memiliki realisasi terbesar Rp964,63 miliar (28,0% dari target Rp3,44 triliun). Sedangkan dari target, realisasi KPP Muara Bungo (Rp297,2 miliar) memiliki capaian tertinggi 42,6% dari target Rp697,9 miliar.

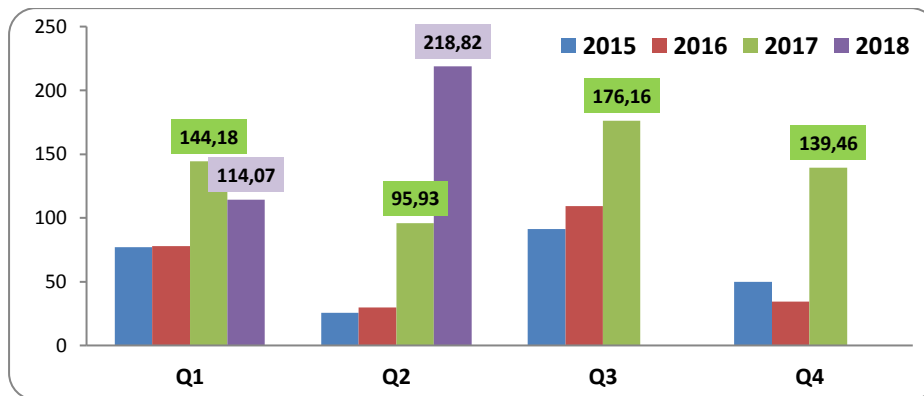
Proyeksi realisasi pendapatan perpajakan s.d. triwulan IV-2018 (seluruh KPP) masih sangat optimis dengan capaian 85%-95% dari total target penerimaan perpajakan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP adalah salah satu komponen anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara. Realisasi PNBP di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan PNBP

Grafik 2.5 Realisasi PNBP 2015-2018 di Provinsi Jambi

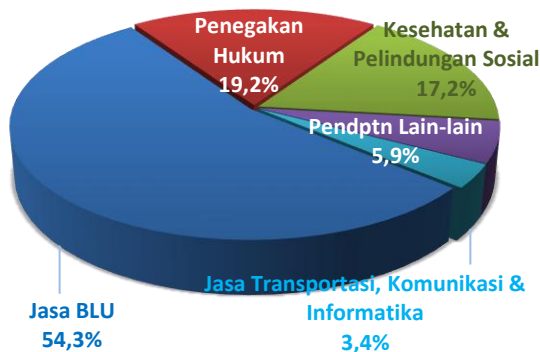


Sumber: SPAN (diolah); (dalam Miliar Rp)

Realisasi PNBP triwulan II 2018 sebesar Rp218,82 miliar atau tumbuh hingga 20,8% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (Rp95,93 miliar). Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLU) penyumbang terbesar dengan Rp149,28 miliar, diikuti Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial & Keagamaan sebesar Rp30,96 miliar, dan Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp28,67 miliar.

b) Komposisi PNBP di Provinsi Jambi

Grafik 2.6 Komposisi PNBP di Provinsi Jambi Tahun 2018 (s.d. triwulan II)



Sumber: SPAN (diolah)

Secara akumulatif, komposisi PNBP s.d. triwulan II 2018 didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLU) sebesar Rp174,9 miliar atau 54,3% dari total PNBP. Berikutnya, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp61,7 miliar (19,2%), Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan Rp55,5 miliar (17,2%), Pendapatan Lain-lain Rp18,9 miliar (5,9%), dan Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi & Informatika sebesar Rp11,03 miliar (3,4%).

Pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) Badan Layanan Umum di wilayah Provinsi Jambi, yaitu: 1 BLU Bidang Kesehatan (RS. Bhayangkara Jambi) dan 2 BLU Bidang Pendidikan (UIN Sultan Thaha Saefudin dan Universitas Jambi)

3. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan salah satu komponen APBN sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN, baik hibah langsung maupun hibah tidak langsung. Berdasarkan data SPAN, untuk Provinsi Jambi s.d. triwulan II 2018 **tidak terdapat** penerimaan yang berbentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

**Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Hibah s.d. Triwulan II
Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2018**

(dalam Juta Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II (Rp)	(%) Realisasi atas Pagu
Hibah	-	-	-
Hibah Langsung	-	-	-
Total Hibah	-	-	-

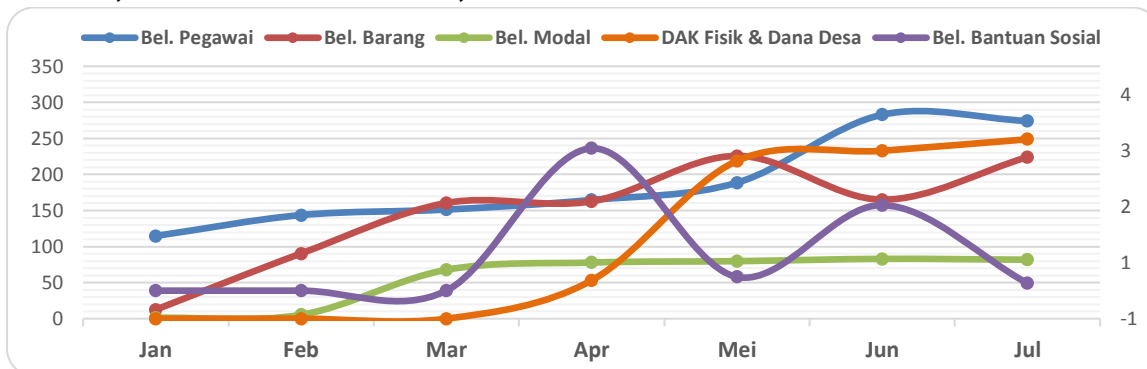
Sumber: SPAN

B. Belanja Negara

Belanja negara merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal, berupa tambahan belanja pemerintah (*increased spending*) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan untuk membantu sektor riil. Belanja negara (APBN) di Provinsi Jambi dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu:

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik 2.7 Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, DAK Fisik & Dana Desa, serta Bantuan Sosial di Provinsi Jambi TA 2018

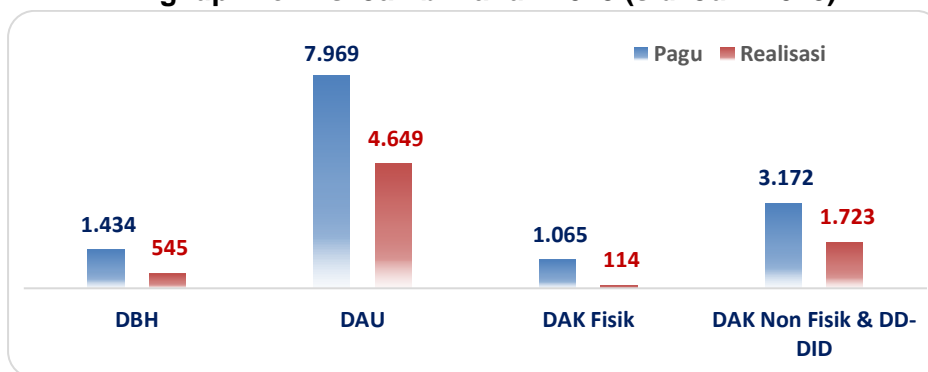


Sumber: SPAN (diolah) (dalam Miliar Rp)

Realisasi belanja (APBN) di Provinsi Jambi s.d. triwulan II 2018 baru tercapai Rp2,92 triliun (tidak termasuk DAU, DBH, dan DAK Non Fisik) atau hanya 33,8% dari total pagu alokasi. Rinciannya, belanja pegawai Rp1,05 triliun, belanja barang Rp817 miliar, belanja modal Rp315,02 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp622,09 miliar. Pada triwulan II, terdapat realisasi belanja bantuan sosial dan DAK Fisik tahap I yang disalurkan oleh KPPN masing-masing Rp4,3 miliar dan Rp114,29 miliar. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) oleh Kanwil DJPB Provinsi Jambi (Bidang PPA I), rendahnya kinerja penyerapan belanja ditengarai masih banyak satuan kerja (alokasi belanja modal cukup besar) yang sedikit lambat mengeksekusi belanja modal (baru 20% dari alokasi belanja modal) akibat lambatnya proses pengadaan. Selain itu, berdasarkan indeks kualitas penyerapan anggaran (IKPA) mayoritas satuan kerja lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jambi memiliki nilai yang cukup rendah.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

**Grafik 2.8 Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2018 (s.d. Juni 2018)**



Sumber: SPAN, SIMTRADA (diolah) (dalam Miliar Rp)

Realisasi penyaluran Dana Transfer ke Kas Daerah hingga triwulan II 2018 sebesar Rp7,03 triliun atau 51,5% dari alokasi pagu. Realisasi DAK Fisik tahap I mulai disalurkan oleh KPPN pada bulan Mei 2018 bagi pemda yang telah melengkapi persyaratan penyaluran DAK Fisik 2018. Persyaratan tersebut yaitu pemda telah melakukan input data capaian output DAK Fisik 2017 dan data kontrak untuk DAK Fisik 2018. KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa hanya dapat melaksanakan penyaluran DAK Fisik (tahap I) dari Kas Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan pada **capaian penyerapan belanja** dan **capaian output** per bidang (yang dikelola oleh SKPD Pemda) untuk DAK Fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga realisasinya akan berdasarkan prestasi masing-masing Pemda dalam melengkapi persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa .

Pengelolaan BLU

Pada 2018, BLU Pusat yang terdapat di wilayah kerja Kanwil DJPB Provinsi Jambi adalah UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi. Kemudian ditambah Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang telah ditetapkan menjadi BLU di bidang pelayanan kesehatan (pertengahan triwulan II-2017) dan terakhir adalah Universitas Jambi (akhir tahun 2017).

Untuk RS Bhayangkara, saat ini sudah menjadi BLU Kesehatan secara penuh. Tahapan masa transisi telah dilalui RS Bhayangkara dengan memenuhi seluruh persyaratan sesuai standar pelayanan minimal BLU di bidang kesehatan.

Manajemen Investasi Pusat

Perkembangan Penyaluran KUR di Provinsi Jambi

Di Provinsi Jambi, penyaluran KUR (Mikro, Ritel, dan TKI) tahun 2018 dilaksanakan oleh 11 (sebelas) lembaga keuangan perbankan, yaitu BRI, Mandiri, BNI, Bank Artha Graha, BCA, Maybank, BPD Jambi, BPD Sumatera Barat, Bank Sinarmas, Bank Bukopin, dan BTN dengan total nilai *outstanding* Rp1,16 triliun. Berdasarkan data SIKP, nilai akad realisasi KUR 2018 (per Agustus 2018) di Provinsi Jambi mencapai Rp1,38 triliun dengan jumlah debitur mencapai 33.055 debitur.

Tabel 2.4 Realisasi Penyaluran KUR Menurut Sektor Usaha 2018

No	Sektor Usaha	Realisasi KUR 2018		
		Akad (d/m jutaan)	Outstanding (d/m jutaan)	Debitur
1	Pertanian dan Kehutanan	800.521	677.827	17.977
2	Perikanan	13.114	10.211	322
3	Industri Pengolahan	27.330	22.714	820
4	Konstruksi	1.000	800	2
5	Perdagangan Besar & Eceran	459.538	378.881	11.767
6	Penyediaan Akomodasi & Makanan	15.341	12.703	284
7	Transportasi, Pergudangan, & Komunikasi	14.198	11.887	303
8	Real Estate, Persewaan & Jasa	4.090	3.766	55
9	Jasa Pendidikan	430	364	8
10	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2.200	821	6
11	Jasa Masyarakat, Sosbud, & Hiburan	43.807	37.697	1.511
Total		1.381.568	1.157.670	33.055

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

Sektor usaha yang paling besar menerima program KUR didominasi oleh sektor Pertanian dan Kehutanan dengan nilai outstanding Rp677,8 miliar. Diikuti oleh sektor Perdagangan Besar & Eceran dengan nilai outstanding Rp378,8 miliar dan sisanya (Rp101 miliar) terbagi ke 9 sektor lainnya. Penyaluran KUR Mikro didominasi oleh BRI dengan nilai outstanding Rp408 miliar, sedangkan Bank Mandiri dominan menyalurkan KUR Ritel (Rp514,8 miliar).

Belum optimalnya realisasi penyaluran KUR di Provinsi Jambi salah satu penyebab utamanya adalah masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsinya sebagai salah satu institusi yang mendorong akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu bersaing dalam iklim usaha yang kompetitif.

C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan pendapatan dan belanja APBN s.d. triwulan IV-2018 lingkup Provinsi Jambi masing-masing Rp4,23 triliun (77,7% dari target) dan Rp7,93 triliun (91,7%). Rendahnya proyeksi pendapatan memperhatikan masih fluktuatifnya harga komoditas unggulan (sawit dan karet) sehingga akan mempengaruhi pendapatan perpajakan (PPH Ps.21 dan Ps.25/29 Badan). Untuk belanja, diharapkan capaiannya bisa melebihi proyeksi dengan mempertimbangkan petunjuk teknis revisi DIPA 2018 diharapkan belanja dapat diserap sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.5 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan IV Tahun 2018

(dalam miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV*	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	5.445,18	2.065,21	37,93%	4.231,05	77,70%
Belanja Negara	8.647,00	2.918,56	33,75%	7.929,72	91,70%
Surplus/Defisit	(1.023,73)	(525,43)	-	(1.361,27)	-

Ket: tidak termasuk transfer ke daerah (DAU, DBH, dan DAK Non Fisik)

*) perkiraan realisasi menggunakan metode analisis *trend*

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Informasi berikut merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Provinsi Jambi;

**Tabel 3.1 Realisasi APBD Agregat Lingkup Provinsi Jambi
s.d. Triwulan II TA 2018 dan 2017**

(dalam Miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	16.279,6	8.344,8	17.317,4	8.216,6
PAD	2.473,8	1.142,7	2.689,0	1.290,2
Pajak Daerah	1.565,9	717,6	1.700,8	885,9
Retribusi Daerah	199,7	50,0	121,2	41,7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	108,1	103,7	128,6	114,7
Lain-Lain PAD yang Sah	600,2	271,5	738,5	247,9
Pendapatan Transfer	13.767,0	7.151,1	14.466,4	6.924,9
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	12.348,3	6.273,2	12.533,0	6.140,6
Dana Bagi Hasil Pajak	987,5	356,6	1.006,9	273,2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	179,3	480,3	223,5	269,5
Dana Alokasi Umum	8.462,6	4.509,2	8.289,4	4.549,0
Dana Alokasi Khusus	2.718,9	927,1	3.013,2	1.048,8
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	947,8	735,0	1.303,9	730,8
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	947,8	735,0	1.303,9	730,8
Transfer Pemerintah Provinsi	470,8	142,9	524,8	53,5
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	470,8	142,9	524,8	53,5
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	-	-	104,7	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	-	-	104,7	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38,8	50,9	161,9	1,5
Pendapatan Hibah	8,1	39,0	160,9	1,5
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	30,7	12,0	1,0	0,0
JUMLAH PENDAPATAN	16.279,6	8.344,8	17.317,4	8.216,6

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
BELANJA	14.885,8	4.735,7	15.726,7	4.956,3
Belanja Pegawai	6.713,3	2.734,6	7.263,6	2.829,9
Belanja Barang	3.207,6	897,4	3.675,3	1.068,2
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	14,9	5,9	41,3	6,2
Belanja Hibah	793,1	351,7	690,8	404,0
Belanja Bantuan Sosial	33,6	15,8	42,7	26,6
Belanja Bantuan Keuangan	333,1	52,7	129,1	-
Belanja Modal	3.736,2	674,1	3.850,3	618,6
Belanja Tidak Terduga	54,1	3,5	33,7	2,7
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.203,2	756,3	2.444,9	897,9
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	565,6	144,9	593,3	70,0
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	562,7	144,9	593,3	69,8
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2,9	0,1	-	0,3
Transfer Bantuan Keuangan	1.637,6	611,3	1.851,6	827,9
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	2,7	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.633,3	609,0	1.836,4	826,9
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4,3	2,3	12,5	0,9
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	17.089,0	5.491,9	18.171,5	5.854,2
SURPLUS/DEFISIT	(809,4)	2.852,8	(854,1)	2.362,4

Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD se-Provinsi Jambi (data diolah); (Unaudited)

Realisasi APBD agregat lingkup Provinsi Jambi s.d. triwulan II 2018 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp8,22 triliun atau 47,4% dari total pagu pendapatan daerah. Jumlah realisasi tersebut lebih rendah 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya (Rp8,34 triliun). Komposisinya pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,29 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp6,9 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,5 miliar.

Berikutnya, realisasi APBD untuk belanja dan transfer daerah baru mencapai Rp4,96 triliun atau 31,5% dari total pagu belanja dan transfer daerah. Terdapat perbaikan jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4,74 triliun. Realisasi belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp1,07 triliun (lebih baik dibanding realisasi tahun sebelumnya Rp897,4 miliar) dan Rp618,6 miliar (lebih rendah dibanding tahun sebelumnya Rp674,1 miliar). Sedangkan realisasi transfer pemerintah daerah sebesar Rp46,3 miliar, jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya (Rp8,7 miliar).

Adanya kasus hukum terkait penetapan RAPBD Prov. Jambi 2018 yang membelit anggota DPRD dan beberapa pejabat OPD serta kasus gratifikasi terhadap Gubernur Jambi cukup berdampak terhadap kinerja roda pemerintahan. Total belanja realisasi belanja agregat (s.d triwulan II 2018) masih cukup rendah (31,5% dari total pagu belanja agregat). Rendahnya kinerja realisasi belanja daerah juga terlihat dari selisih total pendapatan daerah dengan total belanja dan transfer yang mencapai surplus Rp2,36 triliun. Peran *government spending* (pengeluaran konsumsi pemerintah) sebagai stimulus ekonomi Jambi menjadi tidak optimal mengingat laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih ditopang oleh sektor primer (komoditas pertanian dan perkebunan) yang sangat rentan terhadap permintaan dan gejolak harga komoditas global.

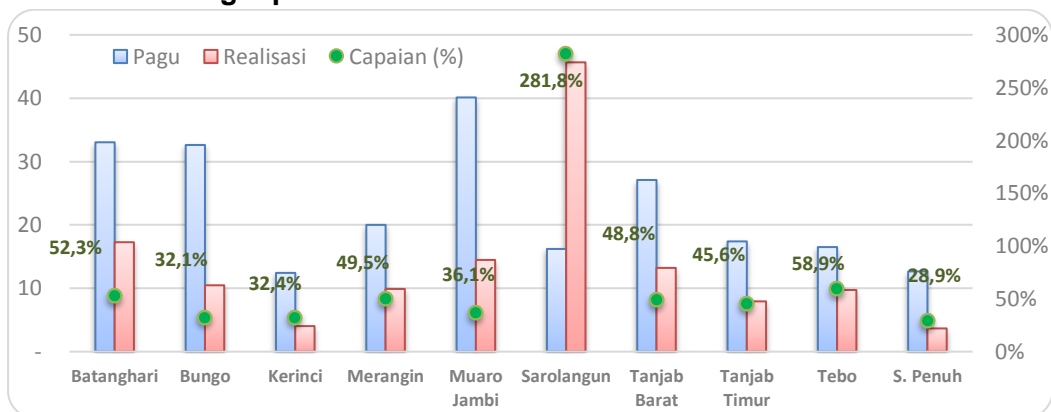
A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD (agregat) sebesar Rp1,29 triliun terdiri dari Pajak Daerah Rp885,8 miliar, Retribusi Daerah Rp41,7 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp114,7 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp247,8 miliar. Capaian realisasi PAD agregat mencapai 47,3% dari total target PAD.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2018

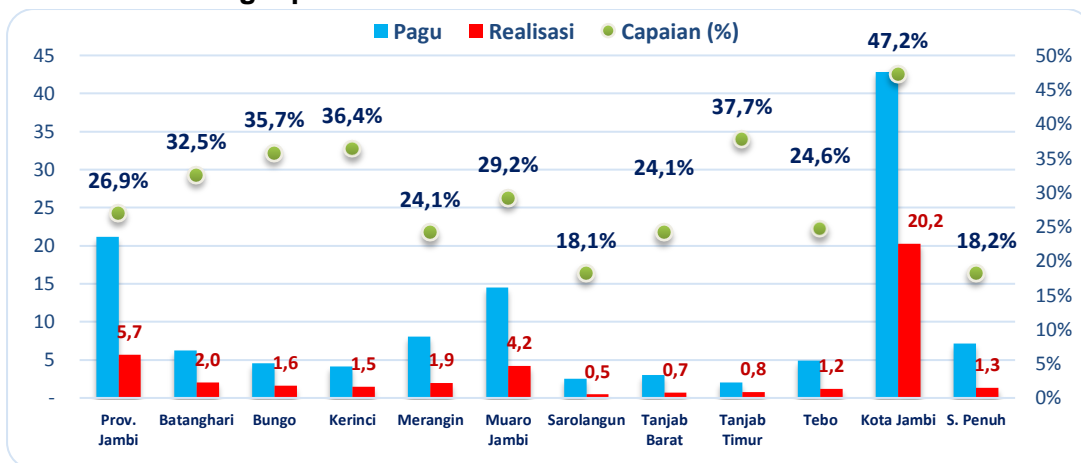


Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD (diolah) (dalam Miliar Rp)

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (agregat) s.d. triwulan II 2018 (Rp885,8 miliar) tercapai 52,12% dari target, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp717,6 miliar. Berikutnya, realisasi dan capaian penerimaan pajak daerah Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi masing-masing sebesar Rp651,7 miliar (51,2%) dan Rp97,8 miliar (48,9%).

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2018

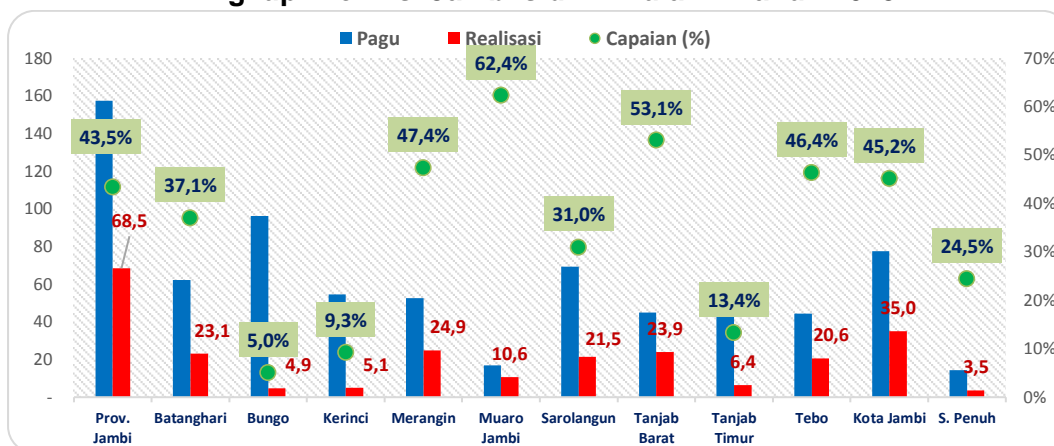


Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD (diolah) (dalam Miliar Rp)

Untuk Penerimaan Retribusi (seluruh Pemda) s.d. triwulan II 2018 (Rp41,7 miliar) baru tercapai 34,4% dari target. Dari sisi capaian, angka tersebut lebih baik jika dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu (25,0%), namun dari sisi nominal, tahun lalu masih lebih baik (Rp49,9 miliar). Target penerimaan dari retribusi terbesar adalah Kota Jambi (Rp42,84 miliar) yang menjadi pusat perdagangan dan bisnis di Provinsi Jambi, realisasi hingga triwulan II sudah mencapai Rp20,24 miliar.

c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2018



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD (diolah) (dalam Miliar Rp)

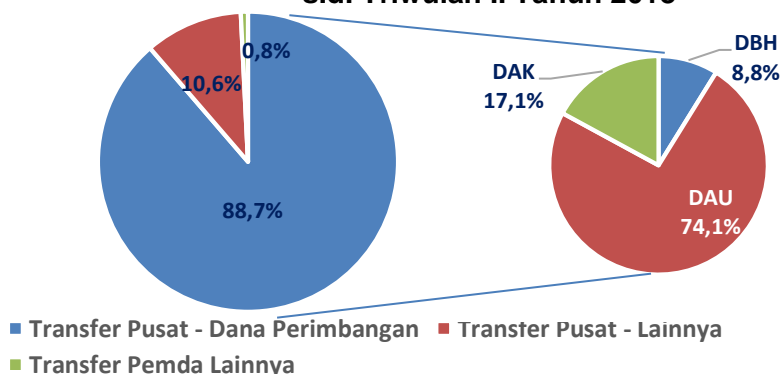
Berikutnya, Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah (agregat) s.d. triwulan II 2018 (Rp247,8 miliar) realisasinya telah mencapai 31,9% dari total target. Namun perlu kita ketahui bahwa sumber utama penerimaan lain-lain PAD yang sah berasal dari pendapatan BLUD dan pendapatan bunga deposito. Dan secara proporsi, komposisi pendapatan bunga deposito kurang lebih 30%-40% dari total penerimaan, dan kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh pemerintah daerah. Adanya sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan bunga deposito menunjukkan masih terdapat *idle money* yang dimiliki Pemda dengan nilai yang cukup signifikan (secara agregat).

*Masih munculnya Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari imbal jasa bunga deposito/simpanan perbankan mengindikasikan **idle money** yang dimiliki Pemda dan disimpan di perbankan nilainya signifikan*

2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan data LRA seluruh Pemda (provinsi/kabupaten/kota) s.d. triwulan II, realisasi pendapatan transfer agregat mencapai Rp6,87 triliun. Terdiri dari transfer dana pemerintah pusat (Transfer dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya) masing-masing sebesar Rp6,14 triliun dan Rp730,7 miliar, dan transfer pemerintah provinsi (dana bagi hasil pajak) sebesar Rp53,5 miliar.

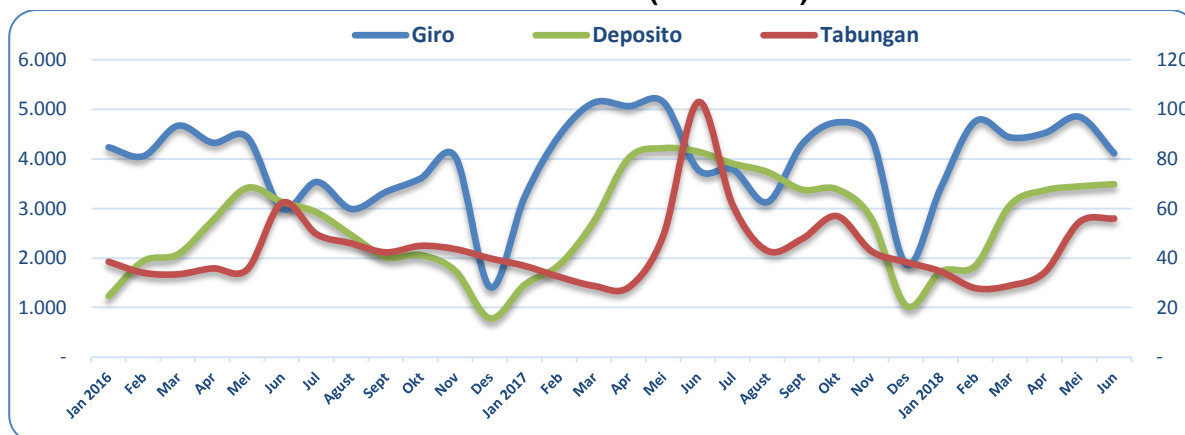
Grafik 3.4 Komposisi Pendapatan Transfer (Agregat) s.d. Triwulan II Tahun 2018



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD (data diolah)

Tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Penyebabnya pendapatan transfer masih menjadi sumber penerimaan utama bagi 12 pemda lingkup Provinsi Jambi.

Grafik 3.5 Perkembangan Dana Pihak Ketiga 12 Pemda di Provinsi Jambi (2016-2018)



Sumber: Bank Indonesia (data diolah); (dalam Miliar Rp)

Berikutnya menurut data Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Indonesia, posisi per 30 Juni 2018 menunjukkan Giro, Deposito, dan Tabungan pemda mencapai **Rp4,11** triliun, **Rp3,48** triliun, dan Rp55,9 miliar. Besaran saldo deposito pemda pada triwulan II-2018 memiliki tren yang sama dengan periode tahun sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan pemda untuk menempatkan *idle money* dalam bentuk deposito malah bersifat kontraproduktif terhadap kebijakan belanja pemerintah (*government spending*) yang seharusnya menjadi sebagai stimulus ekonomi dan mampu memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi menjadi tidak efektif dan kurang optimal.

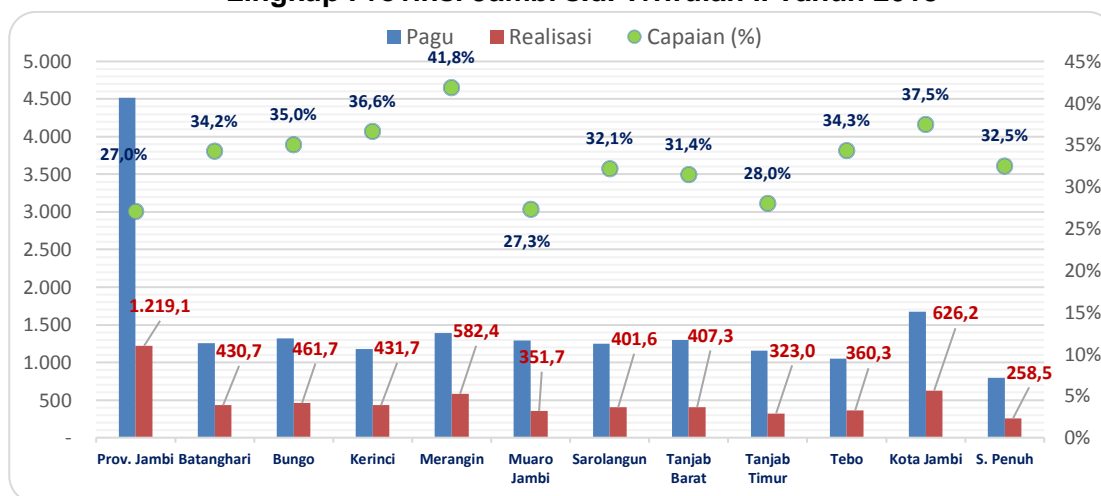
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan darurat, dan pendapatan lainnya, termasuk hibah langsung yang diterima oleh pemerintah daerah. Nilai realisasi dan capaian secara agregat s.d. triwulan II 2018 sebesar Rp1,54 miliar, tidak terlalu signifikan jumlahnya jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

B. Belanja Daerah

1. Realisasi Belanja per Kabupaten/Kota

Grafik 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2018

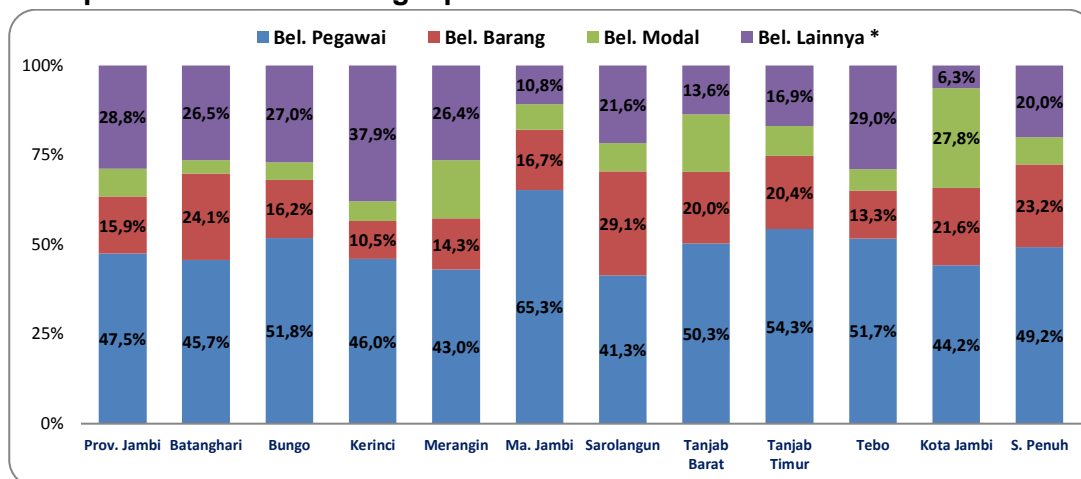


Sumber: DPKAD (diolah) (dalam Miliar Rp)

Secara agregat, realisasi belanja daerah hingga akhir triwulan II 2018 mencapai Rp5,85 triliun (32,15% dari total pagu). Capaian ini hanya sedikit lebih baik dibandingkan realisasi belanja periode yang sama tahun 2017, terserap Rp5,49 triliun (31,9% dari total pagu). Masih rendahnya serapan realisasi belanja daerah mengakibatkan terjadinya **surplus** hingga mencapai **Rp2,85 triliun**. Dengan begitu, jika dirata-rata (dibagi 12 pemda) terdapat **idle money** dari transaksi berjalan sekitar Rp237,5 miliar.

2. Komposisi Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja per Kabupaten/Kota

Grafik 3.5 Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja per Prov/Kab/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2018



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD (data diolah)

Ket: *) Bel. Subsidi, Hibah, Bansos, Tak Terduga, dan Bel. Transfer ke Desa

Menurut jenis belanja, realisasi APBD (agregat) masih didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp2,83 triliun (48,3% dari total realisasi belanja). Diikuti Belanja Barang sebesar Rp1,06 triliun (18,2%), Belanja Modal sebesar Rp618,6 miliar (10,6%), dan Belanja Lainnya sebesar Rp1,34 triliun (22,8%).

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Perkiraan pendapatan dan belanja daerah (agregat) s.d. akhir tahun 2018 lingkup Provinsi Jambi masing-masing Rp14,8 triliun (90,9% dari target) dan Rp14,36 triliun (84,5%). Proyeksi tersebut merupakan target yang sangat optimis mengingat perlu adanya perbaikan kinerja belanja daerah pada triwulan ke III dan IV tahun 2018 dengan didukung oleh pelaksanaan monitoring evaluasi transfer ke daerah dan dana desa (Kanwil DJPB dan KPPN) terhadap kinerja penyerapan belanja dan capaian output, serta ketepatan waktu pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa pada masing-masing Pemda secara intensif dan berkelanjutan sehingga memacu Pemda untuk lebih disiplin melaksanakan eksekusi belanja daerah.

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jambi Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2018

(dalam Miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV*	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	17.296,98	8.216,61	47,50%	17.229,41	99,61%
Belanja Daerah	18.327,37	5.854,17	31,94%	16.598,92	90,57%
Surplus/Defisit	(1.030,39)	2.362,44	-	630,49	-

Ket: *) perkiraan realisasi menggunakan metode analisis *trend*

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu. Pada tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2018 dan 2017**

(dalam Miliar Rp)

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	2.065,17	7.589,28	8.822,20	-8,3%	9.618,21
Pendapatan Perpajakan	1.732,32	885,87	2.618,19	6,6%	2.456,34
Pendapatan Bukan Pajak	332,85	6.703,41	6.204,01	-13,4%	7.161,86
Belanja Negara	9.513,51	5.789,80	8.272,36	-4,7%	8.684,64
Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	2.482,56	4.957,55	7.440,11	-6,2%	7.935,46
Transfer	7.030,94	832,25	832,25	11,1%	749,18
Surplus/(Defisit)	(7.448,34)	1.799,48	549,84	-41,1%	933,57
Pembiayaan	-	570,86	570,86	203,2%	188,26
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	628,93	628,93	195,7%	212,70
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	58,07	58,07	137,7%	24,43
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(7.448,34)	2.370,34	1.120,69	-0,1%	1.121,83

Catatan:

- *) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

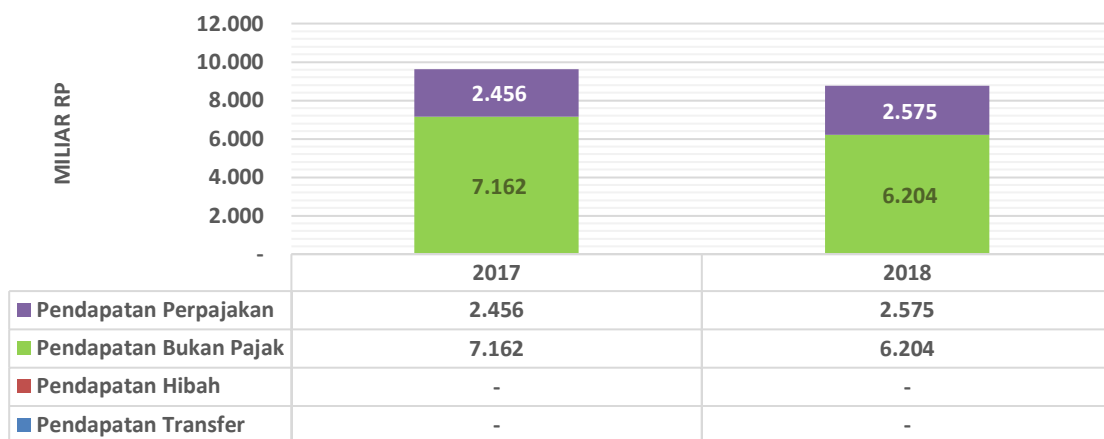
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintahan Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resipokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian dan PNBK konsolidasian terhadap total pendapatan konsolidasian. Perbandingan komposisi pendapatan, yaitu: antara pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pendapatan perpajakan dan PNBK, dan lain-lain. Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBK, hibah dan transfer dana bantuan ke desa.

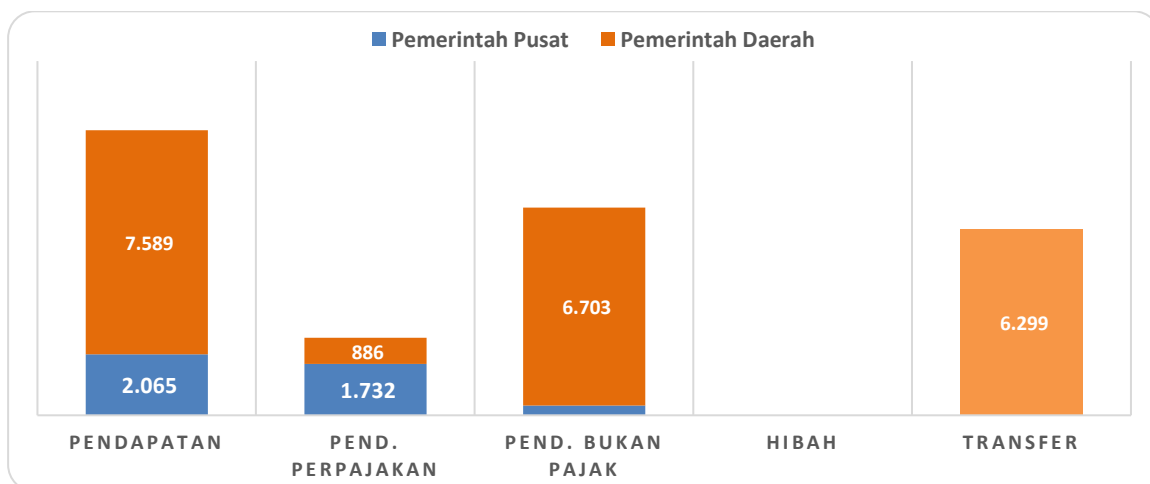
Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Jambi s.d. Triwulan II TA 2018 dan 2017



Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Realisasi pendapatan konsolidasian s.d. triwulan II 2018 sebesar Rp8,82 triliun. Berdasarkan komposisinya, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, proporsi pendapatan perpajakan sedikit meningkat dibanding proporsi PNBPNP. Peningkatan pendapatan bukan pajak konsolidasian pada 2018, disebabkan adanya perubahan metode perhitungan (formula) laporan konsolidasian pemerintah. Pada formula sebelumnya, pendapatan transfer dan hibah merupakan akun tersendiri, sedangkan pada formula terbaru pendapatan transfer dan hibah direklasifikasi ke dalam akun PNBPNP konsolidasian.

Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jambi s.d. Triwulan II Tahun 2018

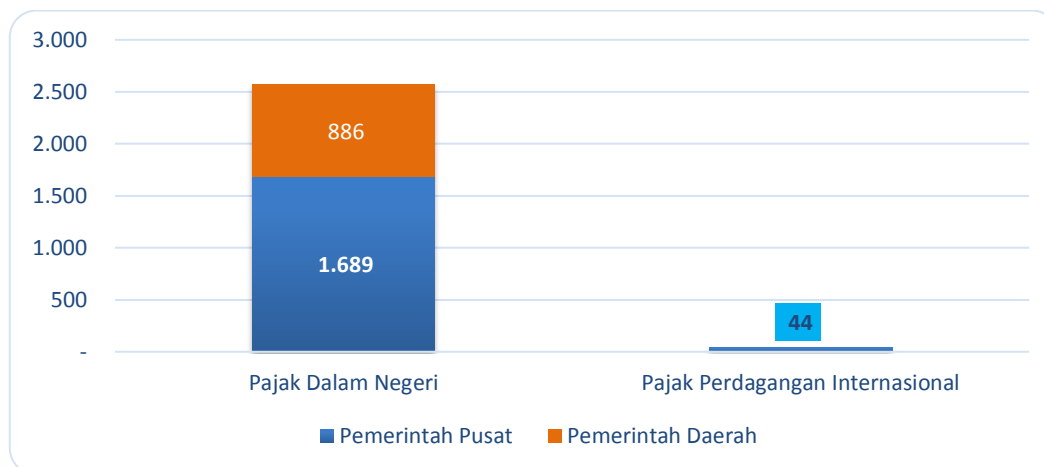


Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah); (dalam Miliar Rp)

Berikutnya, jika pendapatan konsolidasian ditelaah lebih lanjut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka terlihat jelas tingkat ketergantungan pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer. Total pendapatan pemerintah pusat di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp2,06 triliun, sedangkan dana transfer ke daerah mencapai Rp6,29 triliun sehingga terjadi defisit anggaran. Meskipun demikian, kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran masing-masing daerah sehingga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

2. Analisis Perubahan

Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian s.d. Triwulan II 2018



Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah); (dalam Miliar Rp)

Realisasi penerimaan perpajakan konsolidasian s.d. triwulan II sebesar Rp2,62 triliun. Proporsi pajak dalam negeri pemerintah pusat (Rp1,68 triliun) dan pemerintah daerah (Rp885,8 miliar) terhadap penerimaan perpajakan konsolidasian masing-masing mencapai 64,1% dan 33,78%, sedangkan sisanya disumbang pajak perdagangan internasional (Rp43,6 miliar). Dari total penerimaan perpajakan konsolidasian tersebut, nilai pajak dalam negeri (pusat dan daerah) masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total output ekonomi Jambi (atas dasar harga berlaku) sebesar Rp51,9 triliun. Jika realisasi pajak tersebut dijadikan acuan *tax ratio* di Provinsi Jambi, maka nilai *tax ratio*-nya hanya sebesar **5,04%**.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Dengan tersedianya data realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah, maka pendapatan di suatu daerah dapat diperluas tidak hanya pada PAD yang diterima Pemerintah Daerah namun mencakup seluruh penerimaan pemerintah pusat dan daerah di wilayah tersebut yang terdiri:

- Pendapatan pajak daerah,
- Retribusi daerah,
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- Lain-lain PAD yang sah.
- Penerimaan Perpajakan, PNBPN dan Pendapatan BLU Pemerintah Pusat

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	2.456,34	-	2.618,19	6,58%
PNBP	7.161,86	-	6.204,01	-13,37%
Total	9.618,21	-	8.822,20	-8,27%
PDRB/Pert. Ekonomi	46.594,10	-	51.928,20	11,48%

Sumber: LKPK Kanwil DJPB; BPS (diolah) (dalam miliar)

Pada triwulan II 2018, output ekonomi Jambi (atas dasar harga berlaku) mencapai Rp51,9 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70% (yoy). Sedangkan pada periode yang sama, pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp2,62 triliun. Berikutnya, masih rendahnya *tax ratio* dan besarnya selisih (*gap*) nilai pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan tersebut, menunjukkan bahwa sebenarnya masih terdapat potensi penerimaan dari aktivitas perekonomian yang belum dioptimalkan pada penerimaan pemerintah daerah.

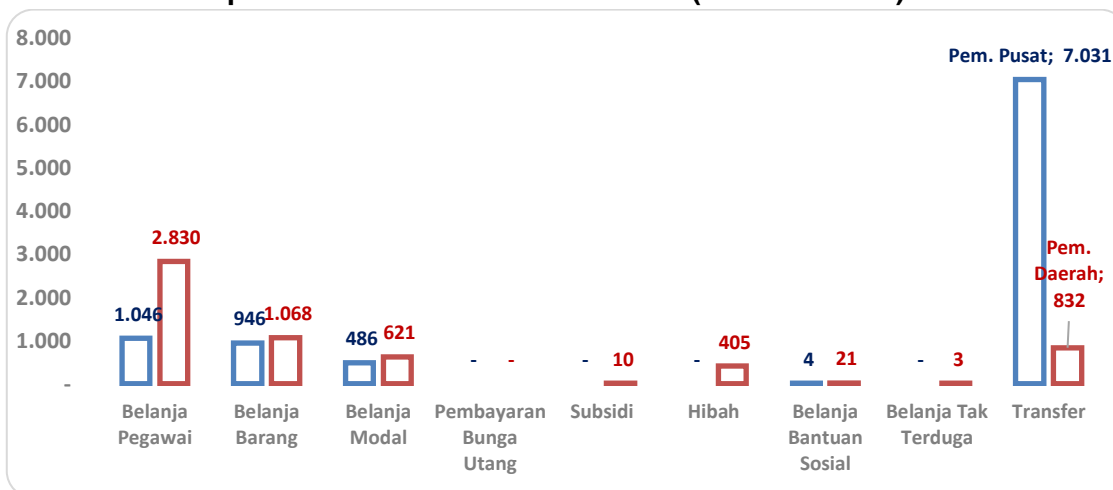
C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi). Analisis terhadap Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan atas:

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi dan komposisi realisasi berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), atau perbandingan antara realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja konsolidasian. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Jambi Tahun 2018 (s.d Triwulan II)

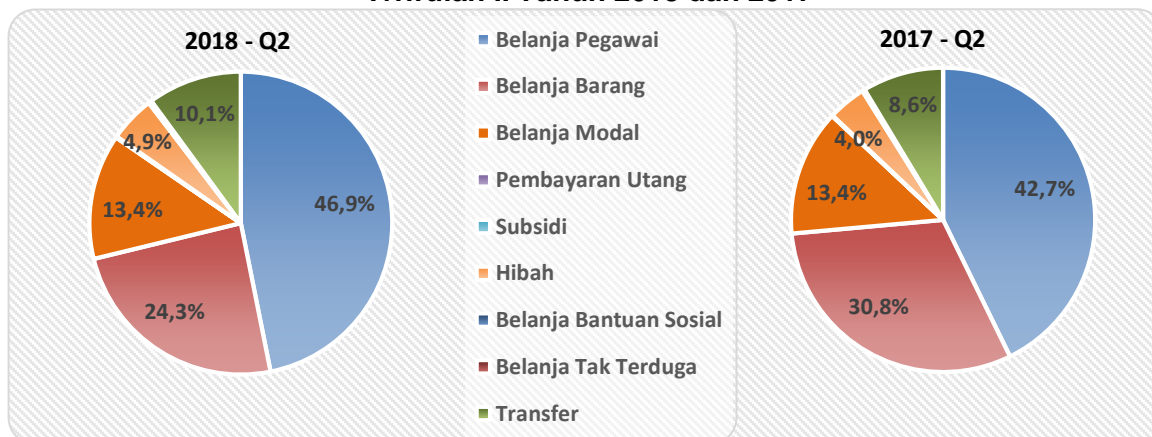


Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah); (dalam Miliar Rp)

Berdasarkan jenis belanja, porsi belanja operasi masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang masing-masing 25,3% dan 13,2% dari total belanja dan transfer konsolidasian. Sedangkan porsi belanja modal hanya sebesar 7,2% dari total belanja dan transfer konsolidasian. Masih kecilnya porsi belanja modal dibanding belanja barang, maka belanja/pengeluaran yang lain harus difokuskan pada jenis program atau kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung (efek multiplier) terhadap perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi Jambi menjadi lebih berkualitas.

2. Analisis Perubahan

**Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasi Provinsi Jambi
Triwulan II Tahun 2018 dan 2017**

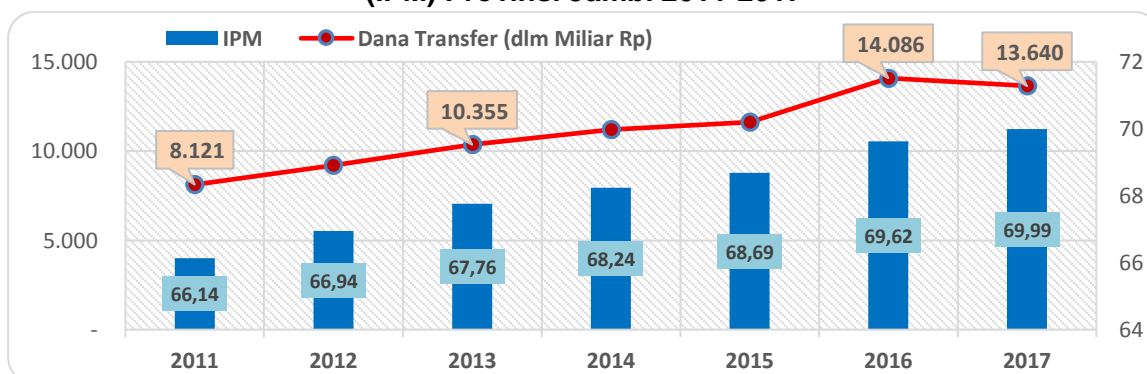


Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Secara umum, komposisi belanja konsolidasi s.d. triwulan II 2018 tidak terlalu berbeda jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain belanja Transfer, terbesar masih belanja pegawai 46,9% dari total belanja konsolidasi. Diikuti belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 24,3% dan 13,4%. Dibandingkan tahun sebelumnya, perbedaan cukup signifikan terdapat pada belanja barang yang mengalami kontraksi cukup dalam (pada tahun 2017 komposisinya mencapai 30,8%) dan meningkatnya transfer konsolidasi sebagai dampak langsung dari perubahan kebijakan penyaluran DAK Fisik (Reguler, Penugasan, dan Afirmasi) dan Dana Desa sesuai amanat PMK 112/PMK.5/2017 tentang Perubahan PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Grafik 4.6 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi 2011-2017



Kebijakan fiskal (dana transfer) pemerintah pusat lingkup Provinsi Jambi sejalan dengan kebijakan *money follow program* untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dalam IPM. Selanjutnya, perbaikan kualitas SDM tersebut harus mampu meningkatkan kinerja perekonomian sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diharapkan.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Nilai PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional, **C** = Konsumsi Rumah Tangga, **I** = Investasi,

G = Belanja Pemerintah, **X** = Ekspor, dan **M** = Impor

Analisis kontribusi pemerintah pada PDRB menggunakan data yang diambil dari Laporan Operasional (*Statement of Government Operations*). Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Jambi triwulan II Tahun Pelaporan:

TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :		
A1	Pendapatan	12.351.362.587.049
a	Pajak	1.732.143.835.459
b	Kontribusi Sosial	-
c	Hibah	772.689.587.907
d	Pendapatan Lainnya	9.846.529.163.683
A2	Beban	4.357.535.782.875
a	Kompensasi Pegawai	1.057.410.725.083
b	Penggunaan Barang dan Jasa	829.097.895.529
c	Konsumsi Aset Tetap	-
d	Bunga	-
e	Subsidi	9.819.404.000
f	Hibah	1.571.727.025.438
g	Manfaat Sosial	4.306.800.000
h	Beban Lainnya	885.173.932.824
GOB	Keseimbangan Operasi Bruto/Neto (1-2+23+NOBz)	7.993.826.804.174
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :		
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	486.565.088.525
a	Aset Tetap	472.226.343.725
b	Perubahan Persediaan	-
c	Barang Berharga	-
d	Aset Non Produksi	14.338.744.800
NLB	Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	7.507.261.715.649
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :		
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	7.484.499.755.704
a	Dalam Negeri	7.484.499.755.704
b	Luar Negeri	-
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(22.761.959.945)
a	Dalam Negeri	(22.761.959.945)
b	Luar Negeri	-

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Dalam Laporan Operasional, kita dapat menghitung kontribusi pemerintah terhadap PDRB, terutama dari belanja pemerintah (G) dan investasi (I). Nilai belanja pemerintah (G) dicerminkan/diproxikan dari nilai pengeluaran konsumsi pemerintah yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa. Sedangkan nilai investasi pemerintah dicerminkan/diproxikan dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan nilai akuisisi aset tetap dikurangi penghentian aset tetap, dalam Laporan Operasional sama dengan nilai Aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto.

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB.

Perhitungan:

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah = Rp4,36 triliun, PMTB = Rp0,49 triliun dan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jambi = Rp51,9 triliun, maka didapatkan;

1. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah $4,36/51,9 = 8,40\%$
2. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah $0,49/51,9 = 0,94\%$

Berdasarkan data diatas, kontribusi belanja pemerintah terhadap output ekonomi Jambi mencapai 8,40%. Namun dari jumlah tersebut, sebagian akan terdistribusi ke dalam konsumsi rumah tangga jika dilihat dari struktur PDRB yang dirilis BPS. Meskipun relatif kecil namun kontribusi belanja pemerintah memiliki peran cukup signifikan terhadap perekonomian Jambi. Belanja pemerintah (belanja pegawai dan belanja barang) cenderung bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi perekonomian, sehingga peran belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi akan kurang optimal ketika realisasi belanja tidak terserap secara teratur dan hanya menumpuk di akhir tahun. Sama halnya dengan investasi pemerintah yang memiliki kontribusi 0,94% terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Meskipun nilainya tidak terlalu signifikan namun efeknya akan dirasakan dan mempengaruhi perekonomian pada masa yang akan datang.

Untuk saat ini, realisasi belanja pemerintah (baik pusat dan daerah) perlu disegerakan untuk diakselerasi penyerapannya (khususnya belanja daerah) agar tidak terjadi penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran. Realisasi belanja yang terkonsentrasi hanya pada triwulan III dan IV akan berakibat pada minimnya kontribusi belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Ekonomi Jambi sangat bergantung terhadap sektor primer sehingga ketika terjadi *shock* pada harga dan permintaan komoditas unggulan (minyak bumi dan gas, batubara, karet, dan CPO) akan langsung berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Jambi. Mempertimbangkan harga komoditas (sawit dan karet) yang masih fluktuatif (trennya menurun) hingga akhir tahun 2018, peran *government spending* sangat dibutuhkan sebagai stimulus perekonomian sehingga laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih mampu tumbuh meskipun ada resiko eksternal.

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik di Provinsi Jambi Tahun 2018

DAK Fisik

Pada tahun 2018, jenis dan ruang lingkup kegiatan DAK fisik disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional dengan memperhatikan prinsip *money follow program*. Kebijakan DAK fisik tahun 2018, yaitu: (1) pengalokasiannya berdasarkan usulan daerah (*proposal based*) sesuai dengan bidang dan menu kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran yang menjadi prioritas pusat dan daerah; (2) pengalokasiannya memperhitungkan kinerja pelaksanaan dua tahun sebelumnya; (3) penajaman alokasi berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan per bidang antardaerah dan antara kegiatan yang akan didanai DAK dengan yang didanai dari belanja K/L; (4) perbaikan penyaluran yang dilakukan melalui: (a) penyaluran per bidang, dengan pembatasan waktu penyampaian laporan per triwulan; (b) penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan (laporan penyerapan dan capaian output); dan (c) penyaluran melalui KPPN setempat sehingga lebih memudahkan bagi pemerintah daerah. Total alokasi DAK Fisik Provinsi Jambi mencapai Rp 1,06 triliun dengan total realisasi penyaluran sebesar Rp 143,98 miliar. Realisasi penyaluran tersebut terdiri dari: DAK Fisik Tahap I (Rp 142,61 miliar) dan DAK Fisik Sekaligus (Rp 1,37 miliar).

Realisasi DAK Fisik (Bertahap & Sekaligus) berdasarkan Jenis Dana TA 2018

dalam jutaan Rp

No	Pemda	DAK Reguler			DAK Penugasan			DAK Afirmasi		
		APBN	Realisasi	Sisa Dana	APBN	Realisasi	Sisa Dana	APBN	Realisasi	Sisa Dana
1	Prov. Jambi	48.591	-	48.591	145.043	-	145.043	779	-	779
2	Batanghari	48.394	11.614	36.780	10.120	661	9.459	-	-	-
3	Tanjab Barat	24.204	3.462	20.742	32.571	1.013	31.558	-	-	-
4	Bungo	38.167	4.724	33.444	38.500	10.016	28.484	23.576	4.805	18.771
5	Sarolangun	53.706	7.058	46.648	17.248	-	17.248	-	-	-
6	Kerinci	50.616	7.455	43.161	4.312	1.540	2.771	-	-	-
7	Merangin	79.417	19.854	59.563	5.990	1.118	4.872	-	-	-
8	Tanjab Timur	38.584	8.338	30.246	61.216	11.947	49.269	21.388	-	21.388
9	Tebo	41.671	9.851	31.820	3.754	637	3.117	-	-	-
10	Muaro Jambi	59.177	1.258	57.919	14.874	-	14.874	-	-	-
11	Kota Jambi	102.064	23.432	78.632	52.359	8.198	44.161	-	-	-
12	Kota S. Penuh	36.146	7.961	28.184	12.143	1.680	10.463	-	-	-
Total		620.738	105.008	515.730	398.131	36.811	361.319	45.743	4.805	40.938

Sumber: OMSPAN (data diolah)

Dari total alokasi tersebut, hanya Pemprov Jambi yang belum memiliki realisasi DAK Fisik (Reguler, Penugasan, dan Afirmasi) dengan alokasi masing-masing Rp48,59 miliar, Rp145,04 miliar, dan Rp779 juta. Sebaliknya, Kota Jambi menjadi daerah dengan realisasi DAK Fisik tertinggi dengan total realisasi sebesar Rp154,42 miliar. Realisasi penyaluran tertinggi terdapat pada DAK Fisik Reguler bidang Jalan dengan nilai Rp47,92 miliar atau 21,01% dari alokasinya (Rp228,15 miliar). Berikutnya, DAK Fisik Reguler bidang Kesehatan & KB (Rp28,94 miliar) dan DAK Fisik Reguler bidang Pendidikan (Rp14,39 miliar). Sedangkan alokasi DAK Fisik Penugasan bidang Pendidikan SMK (Rp31,58 miliar), alokasi dan kewenangannya pada Pemprov Jambi, hingga awal Juli 2018 belum terdapat realisasi penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD.

Total Realisasi DAK Fisik per Bidang TA 2018

No	DAK Fisik per Bidang	APBN	Realisasi Penyaluran	%	Sisa Dana
1	Reguler - Pendidikan	124.986.208.000	14.387.508.750	11,51	110.598.699.250
2	Reguler - Kesehatan & KB	170.705.127.000	28.944.438.750	16,96	141.760.688.250
3	Reguler - Air Minum	8.846.265.000	2.323.815.750	26,27	6.522.449.250
4	Reguler - Perumahan & Pemukiman	2.394.705.000	598.676.250	25,00	1.796.028.750
5	Reguler - Pertanian	42.099.854.000	4.350.005.250	10,33	37.749.848.750
6	Reguler - Pariwisata	11.541.834.000	1.687.439.000	14,62	9.854.395.000
7	Reguler - Industri Kecil & Menengah	2.000.000.000	500.000.000	25,00	1.500.000.000
8	Reguler - Pasar	5.820.936.000	1.129.805.250	19,41	4.691.130.750
9	Reguler - Kelautan & Perikanan	15.732.842.000	2.734.230.750	17,38	12.998.611.250
10	Reguler - Sanitasi	8.457.351.000	428.083.250	5,06	8.029.267.750
11	Reguler - Jalan	228.152.688.000	47.923.750.750	21,01	180.228.937.250
12	Penugasan - Pendidikan SMK	31.578.938.000	-	0,00	31.578.938.000
13	Penugasan - Kesehatan	142.632.809.000	14.419.676.000	10,11	128.213.133.000
14	Penugasan - Sanitasi	31.656.680.000	1.398.546.250	4,42	30.258.133.750
15	Penugasan - Air Minum	11.757.827.000	755.639.500	6,43	11.002.187.500
16	Penugasan - Jalan	90.934.787.000	11.947.375.000	13,14	78.987.412.000
17	Penugasan - Pasar	25.307.388.000	1.649.928.250	6,52	23.657.459.750
18	Penugasan - Irigasi	45.492.705.000	4.729.481.250	10,40	40.763.223.750
19	Penugasan - Energi Skala Kecil	789.467.000	-	0,00	789.467.000
20	Penugasan - LH & Kehutanan	17.980.123.000	1.910.673.250	10,63	16.069.449.750
21	Afirmasi - Kesehatan	588.800.000	-	0,00	588.800.000
22	Afirmasi - Perumahan & Pemukiman	1.031.683.000	-	0,00	1.031.683.000
23	Afirmasi - Transportasi	14.729.529.000	1.167.388.750	7,93	13.562.140.250
24	Afirmasi - Pendidikan	4.360.421.000	-	0,00	4.360.421.000
25	Afirmasi - Air Minum	4.904.762.000	875.218.750	17,84	4.029.543.250
26	Afirmasi - Sanitasi	20.127.695.000	2.762.477.500	13,72	17.365.217.500
Total		1.064.611.424.000	146.624.158.250	13,77	917.987.265.750

Sumber: OMSPAN (data diolah)

Identifikasi permasalahan penyaluran DAK Fisik (Tahap I) tingkat Provinsi Jambi

1. Kurangnya koordinasi antar SKPD-BPKAD terkait dengan peraturan dan petunjuk teknis dilapangan (khususnya masalah pembebasan lahan);
2. Lambatnya proses tender/lelang di pemda yang berdampak terhadap terlambatnya proses perekaman dan upload data kontrak pada aplikasi OMSPAN sehingga DAK Fisik belum dapat disalurkan;
3. Terdapat perbedaan nomenklatur Rencana Kegiatan (pada cetakan rencana kegiatan) yang telah disetujui oleh Kementerian Teknis dengan nomenklatur OPD (referensi OMSPAN).

Mitigasi resiko dan tindak lanjut

1. Dalam rangka meminimalkan resiko gagal salur, koordinasi intensif dan sinergi antara KPPN-Pemda (BPKAD dan OPD/SKPD) harus terus dijalin secara berkelanjutan dalam penyaluran DAK Fisik TA 2018 (baik dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis);
2. Kanwil DJPb Provinsi Jambi intensif melaksanakan monev penyaluran DAK Fisik TA 2018 bersama dengan KPPN dan berkoordinasi dengan Pemda lingkup Provinsi Jambi dalam mengurangi resiko dari kendala dan hambatan yang muncul (penyaluran tahap selanjutnya).